

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

Konsep demokrasi, meskipun dapat ditelusuri jauh ke belakang sampai pada zaman Yunani, telah mengalami pertumbuhan secara signifikan pada masa kebangunan kembali Eropa menuju abad pencerahan. Pada masa itu muncul pemikiran-pemikiran besar tentang relasi antara penguasa dengan rakyat, atau negara dan masyarakat menurut konsep kontemporer. Dalam konteks kontemporer, demokrasi merupakan suatu sistem sosial serta politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi oleh hukum serta kebiasaan dalam melindungi hak-hak individu warga negara.

Dalam demokrasi, terdapat pengakuan terhadap kehendak rakyat yang dijadikan sebagai landasan dalam legitimasi serta kewenangan pemerintahan (kedaulatan rakyat). Kehendak tersebut nantinya akan dituangkan dalam suatu iklim politik terbuka, yaitu dengan melaksanakan pemilihan umum yang diadakan

secara bebas dan berkala. Tiap-tiap warga negara memiliki hak untuk memilih pihak-pihak yang akan memerintah serta juga dapat menurunkan pemerintahan yang sedang berjalan kapanpun mereka mau.

Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 memuat jaminan kedaulatan rakyat, yang berarti, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Pembentuk Undang-Undang Dasar menggariskan, konsep kedaulatan rakyat yang dimaksud di dalam konstitusi tersebut merupakan bahasa lain dari konsep demokrasi yang dikenal luas dalam masyarakat beradab di dunia ini. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wujud dari kedaulatan rakyat untuk memilih para pejabat publik dan merupakan kegiatan mutlak yang akan menentukan jalannya pemerintahan negara yang demokratis.

Dalam sebuah negara demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini, Pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara lain. Sudah barang pasti bila dikatakan, Pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi.¹

Tujuan Pemilu adalah untuk memilih para calon penyelenggara negara, yang kelak akan duduk di dalam lembaga perwakilan rakyat dan lembaga perwakilan daerah di tingkat pusat, lembaga perwakilan rakyat baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta untuk memilih pucuk pimpinan lembaga

¹Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

eksekutif baik di tingkat pusat, yakni presiden dan wakil presiden, maupun sepasang pemimpin eksekutif baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia.² Sistem Pemilu yang digunakan di Indonesia adalah asas langsung, umum, bebas dan rahasia, luber dan jurdil.

Pergerakan politik dalam wadah demokrasi menunjukkan hal yang semakin dinamis yang mengarah mengarah pada persaingan dan perebutan kekuasaan di tiap level dalam Pemilu.

Partai Politik (Parpol) merupakan komponen penting dalam demokrasi. Tanpa Parpol tidak mungkin ada legitimasi. Dengan statusnya, peran Parpol sudah selayaknya jika diharapkan mampu menjamin demokratisasi yang sehat dan efektif. Pentingnya keberadaan partai politik dalam menumbuhkan demokrasi harus dicerminkan dalam bentuk pelaksanaan peran dan fungsinya sebagai agen di dalam rekrutmen politik.

Parpol merupakan wadah seseorang atau sekelompok orang untuk meraih jabatan-jabatan publik. Parpol adalah kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, tujuan dan nilai yang sama tujuan dari kelompok ini adalah merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.³ Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, Parpol adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa

² Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945 – 1980an*, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 9.

³ (Budiardjo, Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai Buku Obor, 1981)

dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Parpol sebagai instrumen rekrutmen kepemimpinan baik di tingkat pusat maupun daerah mengajukan para calon pemimpin untuk ditawarkan kepada rakyat pemilih (*voters*) dalam Pemilu. Pengalaman di lapangan Pemilu selama ini memperlihatkan, persaingan perebutan jabatan-jabatan dalam lembaga perwakilan rakyat, lembaga perwakilan daerah, dan jabatan-jabatan puncak eksekutif, diwarnai oleh persaingan yang sangat ketat. Parpol juga bersaing untuk mendapatkan kader-kader terbaiknya, sedangkan jumlah kader tidak selamanya dapat dipenuhi oleh kalangan internal Parpol. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, Parpol melakukan pendekatan kepada sosok-sosok di luar partai untuk diajak bergabung ke dalam Parpol-nya, bahkan untuk akhirnya dipromosikan menjadi calon yang akan diusung di dalam Pemilu.

Satu fenomena politik dalam setiap Pemilu menunjukkan, sejumlah politisi merasa tertarik untuk berpindah Parpol dengan alasan masing-masing. Perpindahan dari satu Parpol ke Parpol lain bagi sementara kalangan dianggap sebagai hal yang tabu, namun bagi para politisi sendiri hal itu dianggap perilaku yang lumrah. Kelumrahan tersebut dibuktikan dengan menggejalanya perpindahan Parpol dari Pemilu ke Pemilu yang makin banyak, terutama menjelang pencalonan Pemilu.

Dalam setiap pelaksanaan Pemilu, Parpol dituntut harus mampu menempatkan para kader yang mumpuni dan memiliki kredibilitas, akuntabilitas,

kualitas, dan merupakan indikator utama dalam demokrasi. Idealnya pencalonan dalam Pemilu dilakukan tidak sekedar karena hubungan dan kedekatan, tapi karena pertimbangan kapasitas atas sosok-sosok yang dicalonkan.

Pada dasarnya, setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Namun acapkali terjadi penyimpangan terhadap peran dan fungsi dari partai politik yang mengakibatkan banyak anggota partai berpindah dari satu partai ke partai yang lain guna memperoleh keuntungan yang lebih besar dan sebagai alat untuk memajukan diri.

Fenomena politisi yang berpindah dari satu partai ke partai politik lain atau biasa disebut ‘lompat pagar’, dan bukan hal yang baru dalam dunia politik di Indonesia. Ada banyak alasan yang mendasari mengapa para kader partai berpindah menjadi kader partai lainnya. Satu kenyataan bahwa faktor yang mendorong berpindahnya seseorang dari satu partai ke partai lain akibat dari opportunism yang melekat. Namun pada saat bersamaan, para kader yang karena alasan-alasan tertentu berpindah menjadi kader partai politik yang lain. Alasan tertentu yang dimaksud akibat penerapan kebijakan Pemilu sebelumnya (*electoral threshold*) yang mengharuskan yang bersangkutan berpindah dalam rangka melanjutkan karir politiknya. Fenomena politik juga menunjukkan seseorang yang berpindah ke partai lain terlibat konflik internal yang membuat seseorang kader tidak lagi merasa nyaman atau adanya perubahan orientasi politik visi dan misi di dalam partai tersebut sehingga mendorong untuk berpindah.

Faktor terbesar orientasi dan motivasi lompat pagar ialah kekuasaan, sehingga sebagian besar mengarah pada sikap pragmatisme dan oportunisme. Sederhananya, Politisi tak peduli apakah ia memperoleh restu atau tidak dari partainya. Mereka mencari partai lain yang dapat menampungnya. Kondisi tersebut juga akibat sikap pimpinan Parpol yang cenderung membuka lebar masuknya kader Parpol lain tanpa melihat rekam jejaknya.

Praktik perpindahan kader tersebut pada akhirnya memunculkan pertanyaan mengenai loyalitas dan ideologi politik yang dianut, karena belum tentu Parpol baru yang ia masuki memiliki kesamaan ideologi. Keputusan untuk berpindah Parpol menimbulkan kesan hanyalah untuk kepentingan diri sendiri atau bisa dikatakan langkah cepat dalam memuluskan karir politiknya dalam meraih kekuasaan.

Dalam urusan pindah partai, Partai Golkar adalah salah satu partai yang banyak kadernya melakukan loncat pagar atau pindah partai. Banyak elite Partai Golkar yang henggang ke partai lain atau membentuk partai politik baru, sehingga berujung terjadi persaingan suara di setiap ajang pemilu atau pemilihan umum. Partai Golongan Karya atau Golkar merupakan partai bersejarah, partai yang berjaya memimpin bangsa ini selama 32 tahun. Partai yang banyak melahirkan kader-kader terbaik di banyak partai saat ini.

Beberapa kader Partai Golkar yang henggang ke partai lain atau membentuk partai baru, sebut saja Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, bahkan Prabowo Subianto yang kini menjadi Ketua Umum Partai Gerindra. Dalam dunia politik, politisi yang

berpindah-pindah partai dikenal dengan istilah “politisi kutu loncat“ bukan hal baru, namun masih banyak juga kader Partai Golkar yang setia dan bertahan terhadap badan godaan untuk pindah partai dan tetap konsisten sebut saja seperti Abu Rizal Bakrie, Akbar Tandjung, dan Muhammad Jusuf Kalla.

Bila disandingkan dengan perilaku politik di negara lain, seperti negara Amerika misalnya, pindah partai merupakan hal yang tidak semestinya dilakukan dan menyangkut etika para politisi tersebut. Guna mendapatkan kemenangan pada pemilihan di Amerika Serikat (karena faktor berimbangannya kekuatan ideologi atau identifikasi partai politik) maka harapannya berada pada kelompok pemilih kategorimasa pemilih mengambang (*floating mass*) dan juga pemilih yang rasional. Para pemilih *floating mass* biasanya akan menentukan pilihan pada detik-detik akhir, dimana mereka memiliki pertimbangan terkait kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan Ekonomi Kandidat yang diyakini mampu menyejahterakan secara ekonomi rakyat Amerika, mampu menciptakan lapangan kerja yang banyak, mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat baik pada pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan pelayanan pelayanan lainnya akan mendapatkan simpati, empati dari pilihan dari kelompok - kelompok pemilih *floating mass* ini. Keyakinan-keyakinan terhadap kemampuan kandidat dalam memastikan dan menjamin kehidupan masyarakat menjadi tema dan isu penting yang akan dijadikan dasar pemilih menentukan pilihan politiknya.⁴

Pemilu legislatif tahun 2014 sudah diwarnai oleh perpindahan kader partai ke partai lain. Fenomena ini seperti yang dilakukan oleh sejumlah partai yang ada

⁴*Suara Merdeka*, 8 November 2016, hlm.1

di Jawa Tengah. Dari penelusuran data yang ada, tidak ada nilai pasti dari berapa jumlah para kader yang melakukan perpindahan partai yang dimaksud. Namun dari penelusuran penulis terdapat tiga kader, yang pertama yaitu Drs. Fadholi, beliau terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mewakili Dapil Jawa Tengah I setelah memperoleh 41,185 suara. Drs. Fadholi lahir di Kendal pada tanggal 21 Januari 1960. Fadholi adalah tokoh dan pengusaha konstruksi dari Salatiga. Sebelum bergabung Nasdem, Fadholi adalah kader dari Partai Golongan Karya (Golkar) dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Salatiga (2005-2006).⁵ Pada periode 2014-2019 Fadholi bertugas di Komisi IV yang membidangi pangan, perikanan, kehutanan dan pertanian. Fadholi juga merangkap sebagai Anggota di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Berikutnya, Nur Hadi semula kader Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama, berpindah ke Partai Persatuan Pembangunan Kota Pekalongan.

Tabel 1.1 Politisi Pindah Partai menjelang Pemilu Legislatif 2014 di Provinsi Jawa Tengah

No	Nama Calon Legislatif	Partai Lama	Partai Baru	Pemilu Legislatif tingkat
		Pemilu Leg. 2009	Pemilu Leg. 2014	
1.	Fadholi	Golkar	 Nasdem	DPR - RI
2.	Nur Hadi	PKNU	 PPP	DPRD Kota Pekalongan

Sumber : Data KPU yang sudah diolah.

Fenomena pindah partai ini sangat erat kaitannya dengan kaderisasi parpol. Kaderisasi politik merupakan proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-

⁵ Diakses dari <http://wikidpr.org/anggota/5403631742b53eac2f8ef698> Tanggal 3 Mei 2018 pukul 18.00

lembaga politik termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik.⁶ Parpol tidak bisa dilepaskan dengan proses kaderisasi di dalamnya apabila partai memiliki kader-kader yang baik dan berkualitas, maka partai tersebut akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Hal tersebut menjadi sangat penting karena dengan memiliki kader yang baik, maka partai tersebut tidak akan kesulitan dalam menentukan pemimpinnya sendiri dan memiliki peluang untuk mengajukan calon ke bursa kepemimpinan nasional. Selain itu, rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

Penelitian ini ingin mengangkat objek ketiga politisi tersebut, dengan batasan bahwa mereka adalah para politisi yang baik sebelum berpindah partai maupun setelah berpindah partai adalah yang masih terus menjabat sebagai anggota legislatif. Penelitian ini juga membatasi dengan mengabaikan jenjang lembaga legislatif, baik menurut pola dari lembaga legislatif di tingkat provinsi kemudian bahkan terpilih menjadi legislator di tingkat pusat, maupun mereka yang bertahan di jenjang lembaga legislatifnya. Penelitian ini juga membatasi fenomena perpindahan partai di Jawa Tengah, menurut batasan-batasan di atas. Peneliti menyadari, sangat mungkin masih adanya sosok-sosok lain di luar keempat politisi pindah partai di Jawa Tengah tersebut.

Secara konseptual, politisi yang berpindah partai belum memperoleh perhatian sebagai objek kajian tersendiri. Dari penelusuran peneliti, sejumlah

⁶Soeharno, *Diktat Sosiologi Politik*, DIKTAT, Jakarta, 2004, hlm.117.

penelitian terdahulu hanya mengupas mengenai keterkaitan sikap dan norma subyektif dengan intensi anggota parpol untuk berpindah. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengangkat fenomena perpindahan kader Parpol di Jawa Tengah ini, sekaligus ingin mengisi kekosongan penelitian sejenis yang belum pernah dilakukan oleh para peneliti lain. Tempus penelitian ini sengaja terhadap fenomena perpindahan parpol dalam Pemilu Anggota DPRD, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

Di samping karena faktor pribadi, sebenarnya fenomena pindah partai politisi ini merupakan hasil dari percobaan pragmatisme politik yang terjadi hampir pada semua partai. Hal inilah yang kemudian menular ke pragmatisme politisi. Fenomena ini memang marak dan semakin berkembang ketika menjelang pemilihan kepala daerah maupun pemilihan anggota legislatif. Guna mencari dukungan dan pemetaan kekuatan, seringkali politisi tergoda untuk lompat pagar dari partai asalnya, karena merasa tak lagi yakin dengan simpul dan jejaring basis suara partainya serta kondisi rasa nyaman yang sudah tidak ada dipartai sebelumnya.

Penelitian ini membatasi diri pada sejumlah orang yang kader partai tersebut masih menjadi legislative dari Pemilu ke Pemilu baik di partai yang lama maupun di partai yang baru. Selain itu fokus penelitian ini mengabaikan jenjang jabatan, baik perpindahan kader partai yang duduk di tingkat legislatif kota ke legislatif kota, legislatif tingkat provinsi ke legislatif tingkat pusat, maupun bertahan di jenjang legislatif semula. Dari hasil penelusuran peneliti, seluruh perpindahan dari partai satu ke partai lain tersebut berada di provinsi Jawa Tengah

atau memiliki hubungan levelitas yang berada di legislatif Jawa Tengah. Dari hasil penelusuran juga didapat tiga nama yang peneliti menjadikannya sebagai fokus penelitian.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana kronologi dan latar belakang perpindahan partai yang dilakukan oleh seseorang kader ketika melakukan perpindahan partai?
- b. Faktor – faktor apakah yang mendorong seseorang kader suatu partai politik pindah ke partai lain ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui latar belakang seseorang kader suatu partai politik pindah ke partai lain
- b. Mengetahui faktor-faktor eksternal dan internal seseorang kader suatu partai politik pindah ke partai lain

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang dapat diambil untuk memberikan kontribusi pemikiran yang positif untuk kepentingan negara pada umumnya dan pemberantasan korupsi pada

khususnya, terutama sebagai sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang terkait.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan dalam pemberantasan korupsi, manfaat yang ingin dicapai antara lain:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi dan monitoring dalam memperbaiki pola kaderisasi dalam tubuh Partai Politik.
- b. Menjadi bahan pertimbangan dan tambahan pengetahuan kepada lembaga terkait dalam fenomena politisi ‘lompat pagar’.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Pemilihan Umum (Elections)

Fenomena perpindahan partai secara tidak langsung akan memicu reaksi publik berupa sentimen negatif dalam pandangannya terkait partai politik dan akan berakibat pada melemahnya hubungan Partai Politik dengan pemilihnya. Lebih jauh, perpindahan partai juga akan memicu ketidakseimbangan dalam kontestasi politik dalam *open list system* akibat dari perubahan afiliasi pemilih yang lebih cenderung kepada kandidat dibanding Partai Politik.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dimaksud dengan Pemilihan Umum atau

selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Peserta pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota dan perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD.

Pemilu merupakan proses kegiatan yang diselenggarakan untuk memilih wakil – wakil rakyat yang akan menjalankan roda pemerintahan, fungsinya adalah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemerintahan perwakilan.⁷ Dengan kata lain Pemilu pada dasarnya merupakan penafsiran dan pertarungan diantara massa rakyat untuk menentukan wakil – wakil rakyat yang akan duduk diparlemen.

Menurut Ramlan Surbakti, ada tiga tujuan Pemilu diselenggarakan :

a. Pemilu sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum sesuai dengan prinsip demokrasi yang memandang rakyat yang berdaulat, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh wakil – wakilnya.

b. Pemilu dilakukan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan masyarakat kepada badan – badan perwakilan rakyat yang terpilih atau melalui partai – partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.

⁷Arbi, Sanit. (1997). *Partai, Pemilu dan Demokrasi*. Pustaka Pelajar: Jogjakarta, h. 85.

c. Pemilu merupakan sarana memobilisasikan dan menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan ikut serta dalam proses politik.⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita – cita memperjuangkan dan membela kepentingan politik, anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Carl J. Friedrich mendefinisikan Partai Politik sebagai sekumpulan manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan yang resmi bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.⁹

R.H Soutau berpendapat bahwa Partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan untuk mereka. Sementara Sigmund Neuman berpendapat bahwa partai politik merupakan organisasi dari aktifitas – aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta

⁸ Ramlan, Surbakti, *Memahami Ilmu Politik, Gramedia Widia Sarana*, Jakarta, 1992 hlm.181 - 182.

⁹ Miriam, Budiarto, *Dasar – Dasar Ilmu Politik, PT.Gramedia*, Jakarta, 2002, hlm. 161.

merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan – golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.¹⁰

Secara umum fungsi partai politik dapat dikelompokkan menjadi dua fungsi utama yaitu :¹¹

a. Kaderisasi

Kaderisasi memiliki fungsi yang dominan, pada masa dahulu kaderisasi dilakukan bukan oleh Partai Politik melainkan melalui *underbouw* partai dan pimpinan Parpol yang tinggal menerima kader – kader yang dihasilkan oleh ormas. Pada masa sekarang di era demokrasi seharusnya proses kaderisasi dilakukan melalui pimpinan parpol dengan pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan untuk menghasilkan kader – kader Parpol yang akan menjadi pimpinan nasional dimasa depan. Kelangkaan kaderisasi akan merugikan Parpol sendiri karena Parpol tersebut tidak memiliki kader yang memahami platform partai, sejarah perjuangan partai, dan strategi politik yang digunakan oleh partai. Sehingga mudah digoyah dalam memperjuangkan partai karena lemahnya kesetiaan dan *sense of belonging* terhadap Parpol.

b. Rekrutmen

Proses rekrutmen merumakan hal yang sangat penting bagi partai politik, Parpol diharapkan melakukan fungsi rekrutmen yang baik, yakni menempatkan kader – kader pada jabatan – jabatan didalam partai dan jabatan – jabatan politik diluar partai (lembaga eksekutif dan legislatif) berdasarkan kemampuan, kinerja,

¹⁰Ibid, hlm. 161 - 162

¹¹Sebastian Salang, *Potret Partai Politik di Indonesia. Asesmen Terhadap kelembagaan, kiprah dan Sistem kepartaian*, Mitra Alembana grafika – Forum Politisi – FNS, Jakarta, 2007, hlm.8 – 11.

dan pengalaman kader yang bersangkutan. Rekrutmen yang buruk adalah rekrutmen yang didasarkan pada KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme). Akibatnya akan menjadi badai dan merusak citra Parpol yang akan terpuruk dimata masyarakat karena kesalahan kinerja akibat kesalahan dari proses rekrutmen.

Menurut Miriam Budiarto Partai Politik juga berfungsi sebagai sarana pengatur konflik (*conflict management*). Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik Partai Politik harus bisa mengatasinya.¹²

1.5.2. Sikap Politik

Berpindah partai adalah suatu tingkah laku masuk atau menjadi anggota partai baru dan melupakan atau meninggalkan partai lama. Hal ini bukan semata – mata karena ideologi melainkan adanya faktor penarik berupa keuntungan (pragmatism), adanya kekuasaan, dan adanya kepentingan yang dimiliki oleh individu. Berpindah partai juga berarti lunturnya loyalitas dan hilangnya ideologi yang dimiliki oleh anggota partai, sehingga dengan mudah dirinya masuk menjadi anggota partai yang baru. Dengan demikian, identitas dan label anggota Partai Politik yang berpindah partai juga akan berubah, tentu saja dirinya akan membawa ‘Bendera’ dan kepentingan partai barunya, yang mungkin sangat berbeda dengan ideologi partai lamanya.

¹² Miriam, Budiarto. (2002). *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Cetakan ke -22. PT.Gramedia : Jakarta, h. 164.

Ada tiga komponen dari sikap seseorang yang dapat dipelajari sebagai dasar yang mempengaruhi seseorang politisi dalam berpindah partai¹³:

a. *Komponen Kognitif*, yaitu berupa apa yang dipercaya oleh subyek pemilik sikap atau berisi persepsi, kepercayaan seseorang mengenai subyek sikap. Seringkali komponen kognitif disamakan dengan pandangan atau opini, terlebih bila berhubungan dengan masalah yang berlawanan.

b. *Komponen Afektif*, merupakan perasaan individu terhadap obyek sikap dan perasaan yang mengandung masalah emosional. Akan tetapi, pengertian perasaan pribadi seseorang seringkali berbeda perwujudannya bila dikaitkan dengan sikap. Dengan kata lain, tiap orang memiliki alasan yang berbeda dalam bersikap terhadap suatu obyek. Aspek emosional ini yang biasanya memiliki rasio paling dalam sebagai komponen sikap dan merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh – pengaruh yang mungkin dapat merubah sikap seseorang.

c. *Komponen Konatif*, atau komponen perilaku dalam sikap menunjukkan bagaimana kecenderungan seseorang dalam berperilaku berkaitan dengan obyek yang dihadapinya. Asumsi dasarnya adalah bahwa kepercayaan dan perasaan mempengaruhi perilaku. Jadi bagaimana orang akan berperilaku dalam situasi tertentu dan terhadap stimulus tertentu akan banyak ditentukan oleh bagaimana kepercayaan dan perasaannya terhadap stimulus tersebut.

Dalam penelitian fenomenan politisi pindah partai ini penulis menggunakan definisi sikap yang bersifat uni – dimensional yaitu berupa evaluasi positif atau negatif terhadap suatu obyek. Dapat disimpulkan bahwa ada tiga

¹³ Azwar, Saifuddin. (2011). *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Cetakan ke -15. Andi Yogyakarta : Yogyakarta, h. 17.

komponen terhadap sikap pindah partai (loncat pagar), yaitu : aspek kognitif yang berisi pemikiran, keyakinan, kepercayaan, ide, dan konsep tentang perilaku berpindah partai. Aspek afektif yang memuat perasaan atau evaluative seseorang untuk berpindah partai secara positif atau negative, dan terakhir melihat pada aspek konatif yang merupakan kecenderungan untuk bertindak atau bereaksi untuk berpindah partai.

1.5.3. Pragmatisme Politik

Pragmatisme berasal dari kata pragma (bahasa Yunani) yang berarti tindakan, perbuatan. Pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar yang dibuktikan dirinya sebagai benar dengan perantara akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Aliran ini bersedia menerima segala sesuatu, asal saja membawa akibat praktis. Pengalaman-pengalaman pribadi, kebenaran mistis semua bisa diterima sebagai benar dan dasar tindakan asalkan membawa akibat yang praktis yang bermanfaat. Dengan demikian patokan pragmatisme adalah “manfaat bagi hidup praktis”.

Kata pragmatisme sering sekali diucapkan orang. Orang-orang menyebut kata ini biasanya dalam pengertian praktis. Jika orang berkata, rencana ini kurang pragmatis, maka maksudnya adalah rencana ini kurang praktis. Pengertian seperti itu tidak begitu jauh dari pengertian pragmatisme yang sebenarnya, tapi belum menggambarkan keseluruhan pengertian pragmatisme.

Pragmatisme adalah aliran dari filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu adalah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata oleh sebab itu kebenaran sifatnya menjadi relative tidak mutlak. Mungkin

sesuatu konsep atau peraturan sama sekali tidak memberikan kegunaan bagi masyarakat tertentu, tetapi berguna bagi masyarakat yang lain. Maka konsep itu dinyatakan benar oleh masyarakat yang kedua.

Pragmatisme dalam perkembangannya mengalami perbedaan kesimpulan walaupun berangkat dari gagasan asal yang sama. Kendati demikian ada tiga patokan yang disetujui aliran pragmatism yaitu: menolak segala intelektualisme; absolutisme; dan meremehkan logika formal.

Pragmatisme berpegang teguh pada praktek. Berusaha menemukan asal mula serta hakekat terdalam segala sesuatu merupakan kegiatan yang sangat menarik, meskipun kegiatan tersebut luar biasa sulitnya. Sejarah menunjukkan sengketa antara masalah ini di bidang filsafat selalu menyebabkan adanya sementara orang yang menoloknya sebagai suatu masalah yang menyebabkan sementara orang yang lain memandangnya sebagai suatu yang tidak berfaedah.

Penganut pragmatisme menaruh perhatian pada praktek. Mereka memandang hidup manusia sebagai suatu perjuangan untuk hidup yang berlangsung terus-menerus yang di dalamnya terpenting adalah konsekuensi-konsekuensi yang bersifat praktis. Konsekuensi-konsekuensi yang bersifat praktis tersebut erat hubungannya dengan makna dan kebenaran.

Di dalam bukunya *the Meaning Of Truth*, Arti kebenaran, Wiliam James mengemukakan bahwa tiada kebenaran yang mutlak, yang berlaku umum, yang bersifat tetap yang berdiri sendiri dan terlepas dari segala akal yang mengenal. Sebab pengalaman kita berjalan terus dan segala yang kita anggap benar dalam pengembangan itu senantiasa berubah, karena dalam prakteknya apa yang kita

anggap benar dapat dikoreksi oleh pengalaman berikutnya. Oleh karena itu tidak ada kebenaran mutlak, yang ada adalah kebenaran-kebenaran (artinya dalam bentuk jamak) yaitu apa yang benar dalam pengalaman-pengalaman khusus yang setiap kali dapat diubah oleh pengalaman berikutnya.¹⁴

Nilai pengalaman dalam pragmatisme tergantung pada akibatnya, kepada kerjanya artinya tergantung dari keberhasilan dari perbuatan yang disiapkan oleh pertimbangan itu. Pertimbangan itu benar jikalau bermanfaat bagi pelakunya jika memperkaya hidup serta kemungkinan-kemungkinan hidup.

John Dewey adalah seorang pemikir pragmatis, mengatakan pragmatisme bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia serta lingkungannya atau mengatur kehidupan manusia serta aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan manusiawi. Dalam tradisi filsafat, pragmatism dipahami sebagai pemikiran yang menolak gagasan bahwa pikiran manusia dapat menjelaskan, merepresentasikan atau memotret realitas secara objektif dan apa adanya. Kaum pragmatis justru berpendapat bahwa pikiran tidak lebih sebagai instrument untuk memprediksi, bertindak dan memecahkan masalah. Pemahaman atau realitas suatu fenomena hanya bisa dibenarkan jika menghasilkan sesuatu yang bermanfaat (*utility*).

Fenomena politisi pindah partai, memberikan gambaran buruknya sistem kaderisasi parpol sebagai calon anggota legislatif. Perilaku pragmatis yang dilakukan dalam hal ini adalah melakukan segala cara untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan segala cara dan kesempatan yang ada guna mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini menyebabkan mal fungsi Parpol di Indonesia, dan

¹⁴Juhaya, S Praja.(2003). *Aliran – aliran filsafat&etika*. Prenada Media : Jakarta, h. 172.

kurang makna eksistensi karena Partai Politik tidak lagi bersifat ideologis, sebaliknya Partai Politik sangat pragmatis dan oportunistis.

1.5.4. Disfungsional Partai Politik

Disfungsional partai adalah kondisi dimana partai tidak dapat mempertahankan fungsi utama partai. Dalam kaitannya dengan tulisan ini, partai mengalami kegagalan dalam fungsi perekrutan dan kaderisasi partai. Disfungsional tersebut dapat berupa kegagalan partai dalam meregenerasi kadernya. Kaderisasi merupakan fungsi penting dalam membentuk kader yang berkualitas guna menjadi pemimpin di masa depan. Kelangkaan kaderisasi akan merugikan Parpol tersebut karena tidak memiliki kader yang memahami platform partai, sejarah perjuangan partai, dan strategi politik yang digunakan oleh partai. Sehingga dalam perjuangannya untuk partai akan mudah goyah karena lemahnya rasa kesetiaan dan rasa memiliki akan Parpol tersebut.

Sedangkan dalam fungsi rekrutmen, Parpol diharapkan dapat menempatkan para kader pada jabatan di dalam partai dan di luar partai berdasarkan kemampuan, kinerja, dan pengalaman kader yang bersangkutan. Disfungsional dalam proses rekrutmen didasarkan pada KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) yang dapat mengakibatkan rusaknya citra Parpol di mata masyarakat karena kesalahan kinerja akibat kesalahan dari proses rekrutmen.

1.6. Operasionalisasi Konsep

Aristoteles dalam bukunya “*The classical theory of concepts*” mendefinisikan konsep merupakan penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Menurut Tan dalam Koentjaraningrat, mengatakan bahwa “Konsep atau pengertian adalah unsur pokok di dalam suatu penelitian, kalau masalah dan kerangka teorinya sudah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai hal yang menjadi pokok perhatian dan suatu konsep yang sebenarnya adalah definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala itu”.¹⁵

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) adapun dalam penulisan tesis ini jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif dianggap paling sesuai untuk penelitian ini. Penelitian kualitatif ini merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan dilakukan dilokasi sumber *Key Informan* (informan kunci) berada, dalam hal ini *key informan* yang dimaksud ialah Fadholi dan Nur Hadi. Lokasi Nur Hadi berada di Kota Pekalongan dan lokasi Fadholi berada di Kota Salatiga.

¹⁵Koentjaraningrat. 1997. *Metode – metode Penelitian Masyarakat/Redaksi Koentjaraningrat*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, h. 32.

1.7.3. Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menyelidiki dan memahami secara empiris faktor apa saja yang melatarbelakangi perpindahan partai politik oleh Fadholi dan Nur Hadi, menjelang pemilu legislatif 2014. Dalam penelitian kualitatif ini adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian.

1.7.4. Penentuan Informan

Yang dimaksud informan dalam penelitian ini ialah orang atau pelaku yang benar – benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Dengan menggunakan metode kualitatif, maka peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor – faktor kontekstual, jadi lebih memudahkan untuk menjaring sampling sebanyak – banyaknya dari berbagai sumber. Dan fungsi lain dari informan adalah menggali informasi yang menjadi dasar dan rancangan teori yang dibangun.

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan asa pada subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan kunci. Informan kunci dalam penelitian ini subjek penelitian itu sendiri adalah Fadholi dan Nur Hadi. Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini informan diambil dengan metode pengambilan sampel berdasarkan tujuan

(*purposive sampling*), yaitu diserahkan pada pertimbangan data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. *Purposive sampling* dilakukan dengan mengambil dan memilih orang – orang yang terpilih oleh peneliti. Purposive sampling dilakukan dengan wawancara yang mendalam kepada Faktor – faktor apa saja yang melatarbelakangi perpindahan partai politik oleh Fadholi dan Nur Hadi.

1.7.5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara Mendalam

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara informal. Pada jenis wawancara ini pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai. Wawancara dilakukan kepada Faktor – faktor apa saja yang melatarbelakangi perpindahan partai politik oleh Fadholi dan Nur Hadi.

b. Dokumentasi

Pengumpulan dokumen yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini bentuk dokumentasi penelitian yaitu berupa pengambilan foto dan surat – surat lainnya yang dianggap membantu dalam menunjang pada saat penelitian dilakukan.

1.7.6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data kedalam bentuk yang lebih mudah dimengerti dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu informasi yang diperoleh secara

tertulis maupun lisan dan dipelajari sesuatu yang utuh. Dalam analisa kualitatif, terdiri tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan yaitu :

a. Menekankan sumber data, yang dimulai dengan keseleruhan data yang tersedia dari hasil wawancara, observasi, studi pustaka maupun sumber lain.

b. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan hasil penelitian dari lapangan, baik primer maupun data sekunder. Dengan melalui kegiatan ini, maka peneliti dapat menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasi data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhirnya, dengan terlebih dahulu menghubungkannya dengan teori yang ada.

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi, hal ini merupakan langkah terakhir dari kegiatan analisa kualitatif. Penerapan kesimpulan ini tergantung pada besarnya kumpulan catatan dilapangan.

1.7.7. Kualitas Data

Penelitian kualitatif harus memiliki standar kredibilitas yang baik. Standar kredibilitas ini untuk menunjukkan agar hasil penelitian kualitatif memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta yang ada dilapangan.